

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

1.1 Gambaran Umum Pemerintahan Kota Serang

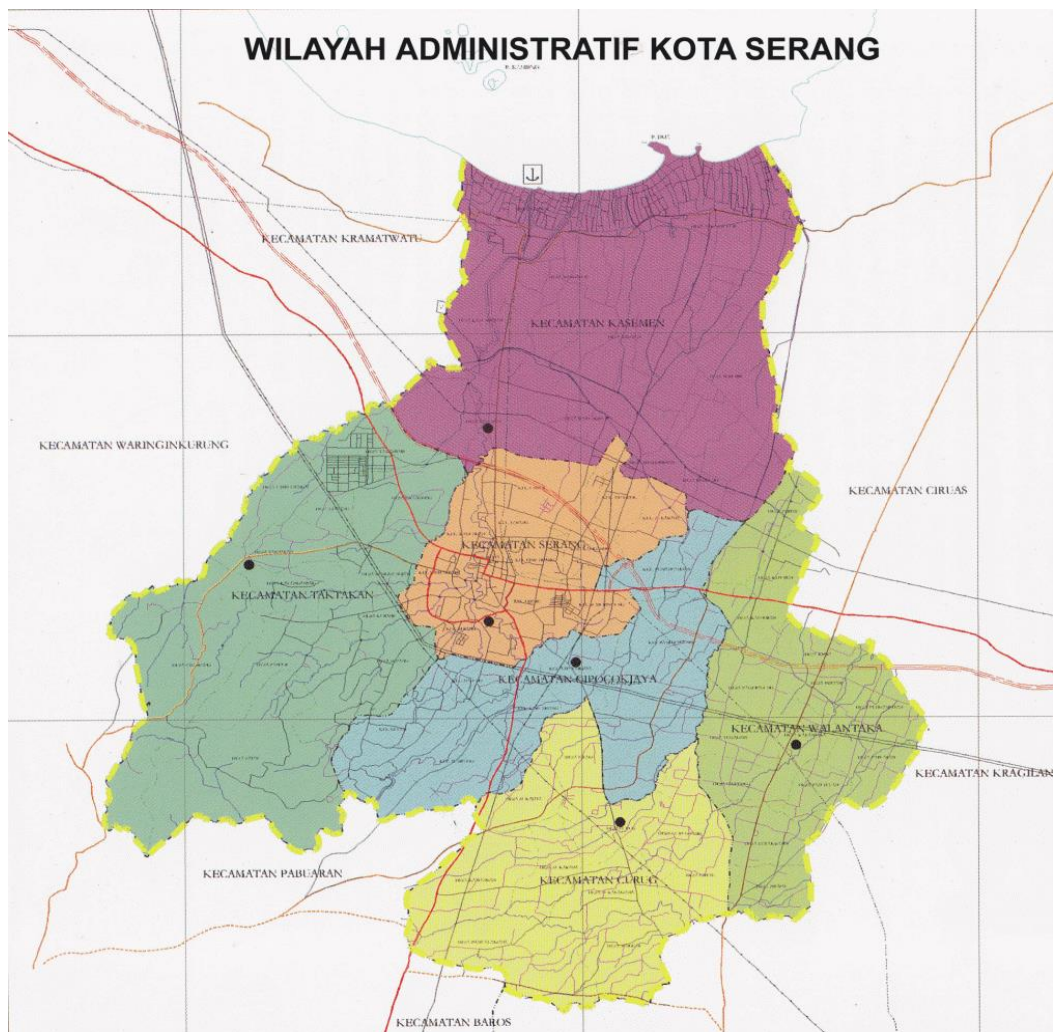
2.1.1 Profil Wilayah

Kota Serang terbentuk dan menjadi salah satu Kota di Propinsi Banten berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2007 yang diundangkan pada tanggal 10 bulan Agustus tahun 2007 dan diresmikan menjadi Kota Serang pada tanggal 10 November tahun 2007. Kota Serang secara geografis terletak antara 50 99' – 60 22' Lintang Selatan dan 1060 07' – 1060 25' Bujur Timur. Apabila memakai koordinat sistem UTM (*Universal Transfer Mercator*) Zone 48E wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m sampai dengan 638.600 dari Barat ke Timur dan 9.337.725 m sampai dengan 9.312.475 m dari Utara ke Selatan. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari utara keselatan adalah sekitar 21,7 Km dan jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 20 km. Sebelah utara Kota Serang berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Serang, begitu juga di sebelah selatan dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang. Kota Serang mempunyai kedudukan sebagai pusat pemerintahan provinsi Banten, juga sebagai daerah alternative dan penyangga (*hinterland*) Ibukota Negara, karena dari Kota Jakarta hanya berjarak sekitar 70 km. Wilayah Kota Serang sebagian besar adalah dataran rendah yang memiliki ketinggian kurang dari 500 mdpl dan beriklim tropis

dengan curah hujan yang cukup tinggi dan hari hujan banyak dengan ukuran tertinggi dalam sebulan 53 mm dan rata-rata 14 hari hujan.

1.1.2 Orientasi Wilayah

Peta Wilayah Administratif Kota Serang



Sumber: http://www.serangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=114

Secara geografis wilayah Kabupaten Serang terletak diantara 5°50' - 6°21' Lintang Selatan dan 105°7' 106°22' Bujur Timur. Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Serang, adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Tangerang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak
- Sebelah Barat : Kotamadya Serang dan Selat Sunda

Secara umum wilayah Kabupaten Serang berada pada ketinggian kurang dari 500 meter dpl dan tersebar pada semua wilayah. Kemiringan tanah atau lereng selain mempengaruhi bentuk wilayah juga mempengaruhi tingginya perkembangan erosi.

1. Penyebaran Kemiskinan di Kota Serang

Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kota Serang sampai akhir tahun 2015 tercatat sebesar 19.238 keluarga miskin dan untuk rincinya dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1

Penyebaran Kemiskinan di Kota Serang

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah RTM
1	Serang	12	3.188
2	Cipocok Jaya	8	2.212
3	Kasemen	10	6.254
4	Taktakan	12	1.895
5	Curug	10	2.936

6	Walantaka	14	2.753
J u m l a h		66	19.238

(Sumber: Dinsos 2015)

Jika dilihat dari data diatas sebaran Rumah Tangga Miskin di Kota Serang, Kecamatan yang tertinggi angka kemiskinannya adalah Kecamatan Kasemen (6.254 RTM) sedangkan terendah yaitu Kecamatan Taktakan (1.895 RTM). Terlihat sebaran data kemiskinan yang paling banyak di Kota Serang ada di wilayah pesisir yaitu Kecamatan kasemen yang lebih banyak penduduk di wilayah ini sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.

1.2 Profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang adalah merupakan salah satuan kerja perangkat daerah Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang. Dari sebuah siklus manajemen pemerintahan, maka Bappeda merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, dengan tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan.

Visi dan Misi Bapeda

Visi

“Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang Berkualitas, Partisipatif, Akuntabel dan Terpadu”.

Misi

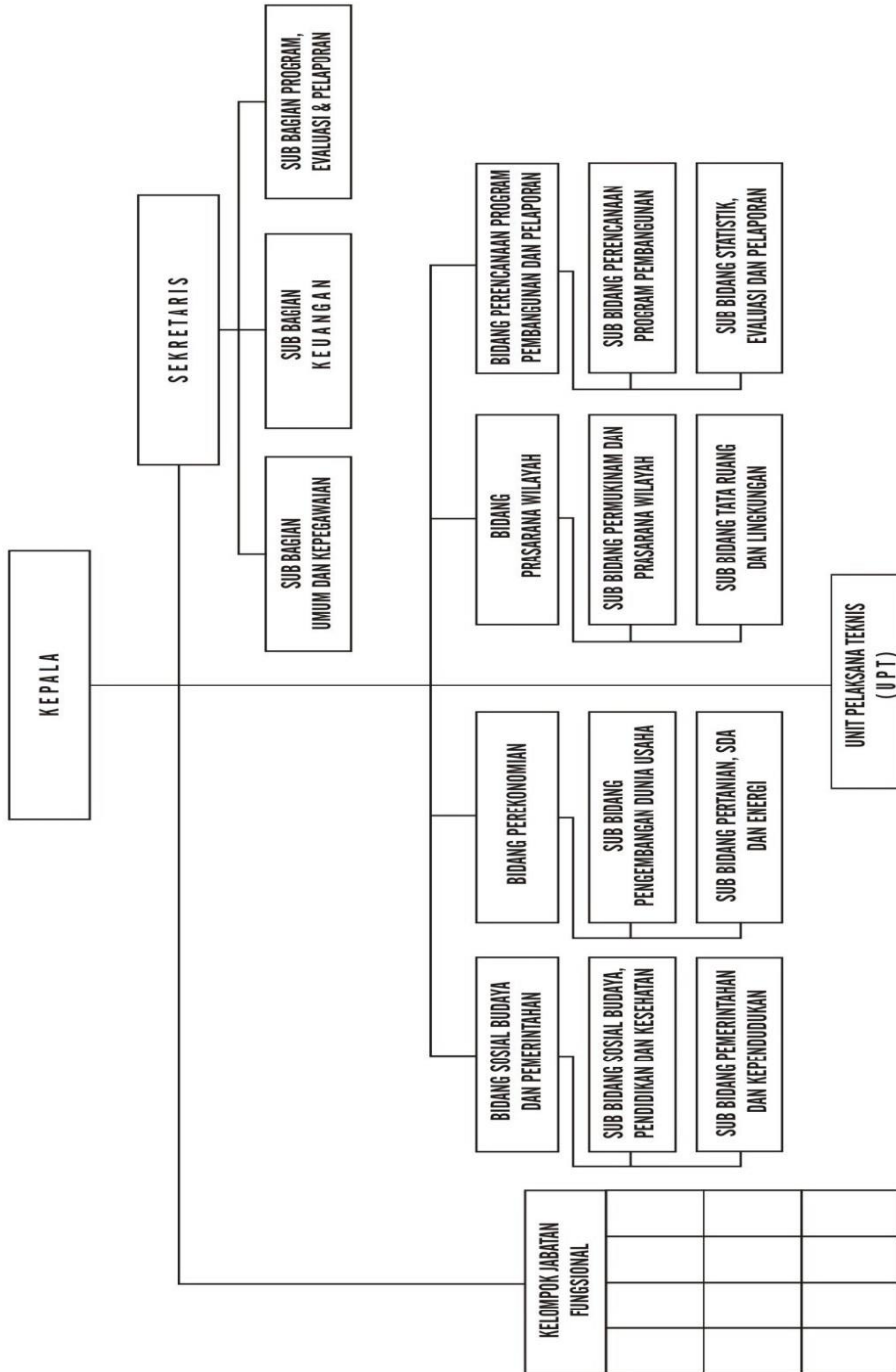
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan.
2. Memantapkan mekanisme perencanaan dan pengendalian pembangunan yang partisipatif, akuntabel, terpadu dan aplikatif.
3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan yang berkualitas.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang berdasarkan daerah Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang, adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA SERANG

SUSUNAN ORGANISASI BAPPEDA KOTA SERANG

Lampiran II Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2013



TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur Penunjang Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Serang melalui Sekretaris Daerah Kota Serang.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
2. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah.

3. Pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
4. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan penanaman modal, perencanaan sosial budaya, fisik dan prasarana serta program, penganggaran, penelitian, pengembangan dan statistik.
5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Aplikasi Madani Sinangkis

Melalui permendagri nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota pada pasal 2, (1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di provinsi (2) Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota. Lanjut pada pasal 7, (1) Gubernur dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) membentuk TKPK Provinsi. (2) Bupati/Walikota dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) membentuk TKPK Kabupaten/Kota.

TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di provinsi; dan
- b) Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di provinsi.
- c) TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas :

1. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota; dan
2. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota.

Implementasi dari percepatan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, memberikan sebuah perubahan dengan adanya inovasi dalam pengentasan kemiskinan, seperti halnya di kota Serang yang membuat sebuah aplikasi berbasis teknologi informasi untuk menanggulangi tingkat kemiskinan.

Mengingat urgensi penyediaan data kemiskinan di daerah dan sebagai tindak lanjut dari program tersebut, TKPKD Kota Serang menyusun aplikasi sistem informasi data kemiskinan bertajuk Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan sistem basis data terpadu yang menyajikan data kemiskinan Kota Serang, program kegiatan pengentasan kemiskinan, realisasi bantuan, monitoring dan evaluasi. Aplikasi ini nantinya dapat dijadikan acuan dalam pemberian bantuan dan

menjadi alat pemantauan (monitoring) dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Data yang disediakan di aplikasi ini terdiri dari data individu, data rumah tangga, program kegiatan dan peta kemiskinan. Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (Madani Siangkis) memiliki beberapa fitur yang telah disesuaikan dengan tujuan penanggulangan kemiskinan.

Fitur-fitur disediakan untuk dua jenis pengguna, yaitu pengguna umum dan pengguna khusus yang harus melakukan login. Pengguna umum dapat melihat data kemiskinan dan peta kemiskinan dari rekapitulasi data individu dan data rumah tangga. Untuk keamanan data masyarakat miskin pengguna umum tidak dapat mengunduh hasil rekapitulasi data kemiskinan. Data Rumah tangga dan individu miskin bisa diperoleh pada admin yang berada di Sekretariat TKPK Kota Serang. Sedangkan pengguna khusus dapat mengakses fitur-fitur tambahan seperti mengakses, merubah, menambah, menghapus dan melakukan pencarian data individu dan data rumah tangga. Pembangunan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Serang merupakan upaya penanggulangan kemiskinan dan menjawab amanat Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan penurunan tingkat kemiskinan secara menyeluruh serta program-program yang belum tepat sasaran dapat segera diwujudkan.

2.3.1 Yang Berperan Dalam Peluncuran Aplikasi

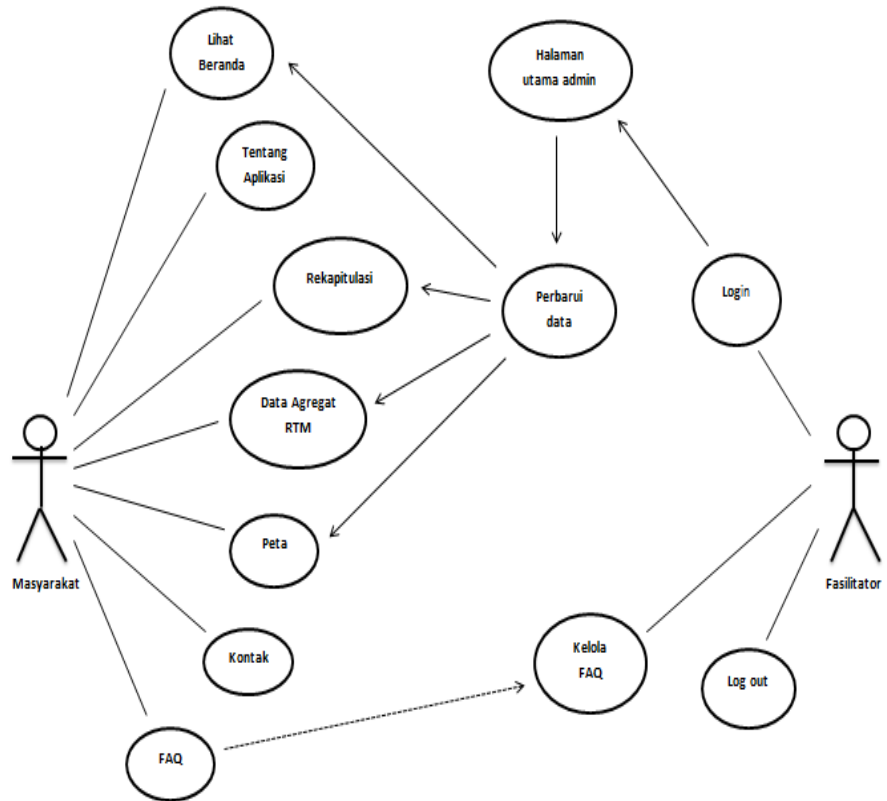
Pada awalnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Serang yang diketuai oleh Gubernur Provinsi Banten beserta anggotanya yaitu SKPD-SKPD membuat sebuah aplikasi yang bertajuk pengentasan kemiskinan, dikarenakan masalah kemiskinan yang terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Kemudian TKPKD tersebut merancang sebuah aplikasi berbasis web yang diberi nama dengan “MADANI SINANGKIS” dengan harapan masalah kemiskinan di Kota Serang dapat teratasi. Kemudian aplikasi tersebut diluncurkan serta dipublikasikan kepada masyarakat oleh Bappeda Kota Serang selaku pihak yang akan bertanggung jawab terhadap aplikasi tersebut.

2.3.2 Sasaran Aplikasi MADANI SINANGKIS

Dengan diterapkannya Aplikasi berbasis web ini, seluruh masyarakat Kota Serang yang tergolong Rumah Tangga Miskin (RTM) dapat merasakan program-program maupun subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Sehingga masyarakat yang tadinya tidak mendapat subsidi, dengan diterapkannya aplikasi ini, tingkat kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

2.3.3 Mekanisme Aplikasi Madani Sinangkis

Gambar 2.1 Diagram Mekanisme Aplikasi Madani Sinangkis



Penjelasan dari diagram diatas bahwa user dalam mengakses web terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Masyarakat (Umum).

Masyarakat hanya dapat mengakses mengenai data-data yang telah diberikan pemerintah terkait data-data Rumah Tangga Miskin (RTM) dan tidak bisa merubahnya. Tetapi masyarakat dapat memberikan pengaduan ataupun masukan

kepada pemerintah didalam aplikasi web tersebut dengan meng-click kolom FAQ.

b. Fasilitator (Khusus).

Fasilitator merupakan tim khusus yang dibentuk oleh TKPKD untuk memantau kejadian dilapangan ataupun memberikan data terbaru yang akan di upload kedalam aplikasi web tersebut.

2.3.4 Tujuan dan Manfaat Aplikasi Madani Sinangkis

Tujuan dari penyusunan aplikasi Madani Sinangkis yaitu sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan manfaatnya yaitu pemerintah dapat memonitoring secara langsung melalui aplikasi ini mengenai program yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran atau tidak.

2.3.5 Program Pengentasan Kemiskinan di dalam Aplikasi Madani Sinangkis

Program pengentasan kemiskinan yang ada di dalam aplikasi Madani Sinangkis ini merupakan program prioritas dari masing-masing SKPD yang kemudian datanya diinput ke dalam aplikasi Madani Sinangkis menjadikannya data tunggal. Sementara ini hanya 1 SKPD yang sudah berkontribusi dalam aplikasi ini, yaitu Dinas Sosial. Berikut profil program-program

utama yang digulirkan oleh Dinas Sosial dalam pengentasan kemiskinan di Kota Serang :

1. Dinas Sosial, terdiri dari 2 program :

a) Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) merupakan pemberdayaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Sehingga pada akhirnya harkat dan martabat orang miskin dapat terangkat. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi jauh lebih penting bagaimana membangun kapasitas kelompok masyarakat miskin yang memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni sekaligus dapat mengatasi masalah kemiskinan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat.

b) Program Rehabilitasi Pengemis

Rehabilitasi Sosial merupakan salah satu program yang dilakukan pemerintah khususnya pemerintah Kota Serang dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Rehabilitasi Sosial berarti pemulihan kembali keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial kembali seperti semula, Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang

ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang kedalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan. Program ini telah diatur dalam peraturan daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 rehabilitasi sosial merupakan salah satu upaya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Serang dimana dalam hal ini Dinas Sosial merupakan pihak yang bertanggung jawab, hal tersebut tertera dalam perda Kota Serang nomor 2 tahun 2010 pasal 17 ayat 1-3 yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dan masyarakat wajib melakukan pembinaan terhadap orang atau sekelompok orang yang terbukti melakukan penyakit masyarakat.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial.
3. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Bimbingan, pendidikan, pelatihan dan keterampilan teknis.
 - b. Bimbingan, penyuluhan rohaniah dan jasmaniah.

- c. Penyediaan lapangan kerja atau penyaluran tenaga kerja.

2.3.6 Perancangan Sistem Aplikasi

1. Kebutuhan Piranti Perangkat Keras (Hardware).

Spesifikasi piranti perangkat keras untuk mendukung aplikasi berbentuk website ini agar dapat berjalan dengan baik. Berikut adalah spesifikasi perangkat keras minimal yang dibutuhkan:

- a. Seperangkat laptop/komputer dengan spesifikasi Processor minimal Pentium II 233 Mhz ke atas.
- b. Sisa ruang kosong pada hardisk minimal 50 Mb.
- c. RAM/Memory 128 MB (SDR/DDR).
- d. Monitor/LCD.
- e. Mouse dan Keyboard.
- f. Teknologi jaringan berupa LAN/Internet.

2. Kebutuhan Piranti Perangkat Lunak (Software)

Mengacu pada kebutuhan piranti perangkat keras diatas, perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi ini adalah:

- a. Web server digunakan untuk pengembangan aplikasi web yang dapat melayani permintaan dari client melalui web browser.
- b. Web browser sebagai antarmuka dalam pengembangan.
- c. Database sebagai tempat penyimpanan data.
- d. Bahasa pemrograman yang dapat menghubungkan aplikasi database dengan web server.

Spesifikasi perangkat lunak adalah sebagai berikut:

- a. Apache HTTP Server Versi 1.3.23 sampai dengan 2.0.39
 - b. Sistem Operasi Windows XP/NT/ME/2000/98
 - c. PHP Versi 2.1 sampai dengan 5.0.2
 - d. MySQL Versi 1.3 sampai 5.0.
 - e. Web Browser seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox dll.
3. Fasilitator (Brainware)

Fasilitator disini dibentuk oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. Keanggotaannya sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Kepala Daerah

(Gubernur/Bupati/Walikota)

Ketua : Wakil Kepala Daerah (Wakil
Gubernur/Wakil Bupati/Wakil
Walikota)

Wakil Ketua : Sekretaris Daerah

Sekretaris : Kepala Bappeda

Wakil Sekretaris : Kepala BPMD

Anggota :

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah.
2. Dinas Pekerjaan Umum.
3. Dinas Kependudukan.
4. Dinas Sosial.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika.
6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
7. Inspektorat Daerah.
8. Sekretariat Daerah.
9. Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah.
10. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Daerah.
11. Badan Usaha Milik Daerah.
12. Perusahaan Swasta Setempat.

13. SKPD Lainnya.
14. Perguruan Tinggi Setempat.
15. Dunia Usaha.

2.3.7 Perancangan Sistem

Perancangan sistem dalam aplikasi Madani Sinangkis terdiri dari: perancangan proses DFD, perancangan Basis Data dan perancangan user interface.

1. Perancangan Data Flow Diagram (DFD) digunakan untuk mendokumentasikan proses suatu sistem yang telah ada atau sistem yang akan dikembangkan secara logika tanpa memperhatikan lingkungan fisik dimana data tersebut akan disimpan.
2. Perancangan Basis Data dilakukan untuk mengatur data dalam kelompok file-file tertentu sehingga data tersebut menjadi terorganisir di suatu tabel yang dapat berelasi dengan file-file tabel lainnya.
3. Perancangan User Interface adalah tampilan yang dirancang sedemikian rupa agar mudah melakukan pengambilan data dan penginputan data oleh pemegang admin. Terdiri dari:
 - a. Halaman Home/Beranda.
 - b. Halaman Tentang Aplikasi
 - c. Halaman Rekapitulasi.

- d. Halaman Data Agregat RTM (Rumah Tangga Miskin).
- e. Halaman Peta
- f. Halaman Kontak
- g. Halaman FAQ
- h. Halaman LOGIN

2.3.8 Pengguna (*User*)

Aplikasi Madani Sinangkis terbagi atas tiga pengguna:

1. User Umum

Pengguna jenis ini terdiri dari masyarakat umum yang membuka situs website yang akan memonitor pelaksanaan program pengentasan warga miskin atau melihat data mengenai program dalam pengentasan kemiskinan.

2. Administrator

Pengguna ini terdiri dari SKPD-SKPD yang akan menginput data dan memperbarui data setiap satu bulan sekali mengenai data warga miskin.

3. Fasilitator

Pengguna ini merupakan pihak yang menerima aduan dari masyarakat terkait keluhan terhadap program-program yang tidak tepat sasaran.